

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang masalah

Indonesia merupakan suatu Negara yang demokrasi. Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan dimana semua masyarakat yang ada di Negara ini memiliki kebebasan yang sama untuk membuat keputusan yang dapat mengubah standar hidup mereka menjadi lebih baik. Indonesia juga menganut sistem demokrasi dimana sistem demokrasi dapat berupa sistem pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, segala sesuatu yang diberikan atau diurus oleh pemerintah Indonesia harus mempunyai dampak yang signifikan, agar siap memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia (Salmadian, 2018).

Indonesia juga merupakan negara yang memiliki sistem pemerintahan desentralisasi. Sistem desentralisasi juga merupakan sistem yang pemerintahannya dijalankan oleh masing-masing daerah. Kebijakan desentralisasi menekankan bahwa setiap pemerintah daerah di Indonesia mengelola pemerintahan dan mengelola keuangan daerahnya sendiri, namun tetap berada di bawah pengawasan pemerintah pusat (Christo, 2018).

Seiring dengan perkembangan teknologi dan juga perekonomian di Indonesia, kebijakan yaitu *good government governance* atau disebut dengan pemerintahan yang baik. *Good governance* adalah sebuah bentuk keberhasilan dalam mengelola pembangunan selama pemerintahan yang baik.

Pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan perubahan, sehingga masyarakat dapat berkembang di suatu negara. Pemerintah harus mampu mendorong terjadinya suatu peristiwa melalui kebijakan, program, proyek dan sebagainya (Priskila, 2020)

Good governance adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi, menghindari salah alokasi dana investasi, dan mencegah korupsi baik secara politik maupun administratif. Tata kelola yang baik menegakkan disiplin anggaran dan menciptakan keputusan kerangka hukum dan politik untuk perluasan kegiatan bisnis. Tata pemerintahan yang baik bertumpuh pada suatu gagasan yang mengacu pada metode pencapaian keputusan dan pelaksanaannya akan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Sebagai consensus yang dicapai oleh pemerintah, warga Negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara (Herdiwinoto, 2017).

Dalam penyelenggaraan *good governance* terdapat beberapaprinsip – prinsip yaitu : *pertama* Partisipasi masyarakat adalah setiap masyarakat berhak memiliki suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, *kedua* Penegakan hukum yang bersifat adil dan berlaku untuk semua masyarakat tanpa pandang bulu. Termasuk penegakan hukum yang mengacu pada hak asasi manusia, *ketiaga* Transparansi adalah setiap informasi tentang proses pemerintahan harus memadai dan jujur sehingga dapat dipahami, diakses dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat, *keempat* Daya tangkap adalah institusi dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha dan melayani semua pihak yang berkepentingan tanpa diskriminasi, *kelima* Berorientasi consensus adalah untuk

melayani kepentingan yang berbeda sehingga membuat konsekuensi yang komprehensif tentang apa yang terbaik bagi masyarakat mengenai kebijakan dan prosedur, *keenam* Berkeadilan adalah setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraannya, *ketujuh* Efektivitas dan efisiensi adalah semua proses lembaga dan pemerintah harus dapat menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi kerja, *kedelapan* Akuntabilitas adalah semua pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan lembaga-lembaga yang berkepentingan, *kesembilan* Ber visi strategi adalah para pemimpin harus memiliki prospek yang luas dan berpandangan jauh ke depan mengenai pemerintahan dan pembangunan manusia. Selain itu, pemimpin bahkan harus memiliki kepekaan tentang apa yang dibutuhkan untuk memahami perkembangan tersebut dan harus memiliki pemahaman tentang kesejahteraan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut, *kesepluluh* Saling berkaitan adalah seluruh prinsip *good governance* yang telah disebutkan di atas saling memperkuat dan saling terkait serta tidak dapat berdiri sendiri (Herdiawanto, 2019).

Dari kesepuluh prinsip yang di jelaskan di atas, ada tiga prinsip utama yang mendasari indikator dalam implementasi tata pemerintahan yang baik di pemerintahan di antaranya yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, dan Efisiensi dan Efektivitas. Indikator - indikator ini harus diterapkan dengan benar demi mencapai *good governance* (Saparniene dan Valukonyte 2012). Ketiga indikator itulah yang akan ditekankan dalam penelitian ini untuk mengukur tata kelola

pemerintahan yang baik di desa yang ada di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.

Penerapan prinsip-prinsip good governance juga sangat penting dalam mewujudkan good governance. Asas pemerintahan yang prima juga berperan sebagai pengontrol bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan bebas dari tindakan korupsi. Juga digunakan sebagai penilaian kinerja pemerintah desa di Kecamatan Walenrang.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk menguasai desa dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati. Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa memiliki ciri-ciri yang berlaku umum di seluruh Indonesia. Sementara itu, desa adat atau disebut dengan nama lain, memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa pada umumnya.

Besarnya tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintahan desa, menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemberian tanggung jawab yang besar tidak dalam rangka penyiapan sumber daya manusia yang unggul. Alhasil, lahirnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan desa masih jauh dari harapan (Weny, Tome, 2017).

Hal ini terlihat dari kurangnya kedisiplinan aparat desa dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, sebaliknya pemberian otonomi desa telah

menciptakan kantong-kanting baru korupsi di lingkungan Negara. Fakta ini terlihat dari penangkapan enam kepala Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi penyalagunaan dana desa pada tahun 2015. Dari keseluruhan anggaran mulai dari Rp250 juta – Rp300 juta per desa, sekitar 30 persennya di salah gunakan (Kompas, 2016).

Walenrang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Indonesia. Walenrang terdapat di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Walenrang merupakan kecamatan yang unik (bersama dengan 5 kecamatan lainnya yaitu Walenrang Barat, Walenrang Timur, Lamasi, dan Lamasi Timur) karena ibukota kabupaten terletak diantara kota/kabupaten lain, jarak antara ibukota kabupaten dan kecamatan ini kabupaten ini agak jauh, yaitu sekitar 100 Km dan harus melewati 1 kota lain untuk menempuhnya dan ditempuh dalam waktu 2 jam. Di Kecamatan Walenrang terdapat 9 desa/kelurahan yaitu : Desa Barammase (Bara Mamase), Desa Batusitanduk, Kelurahan Bulu, Desa Harapan, Desa Kalibamamase, Desa Lalong, Desa Saragi, Desa Tombang dan Walenrang (Wikipedia, 2020).

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan Desa di Kecamatan Walenrang”.

1.2 Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana penerapan prinsip-

prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan Desa di Kecamatan Walenrang.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas tujuan peneliti adalah: "Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Walenrang.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman untuk :

1.4.1 Manfaat teoritis

Manfaat teoritis sebagai tambahan ilmu tentang penerpan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelolah pemerintahan khususnya pemerintah Desa. Penelitian ini diharapkan dapat di kembangkan dengan baik bagi peneliti selanjutnya yang relevan dengan bidang ini.

1.4.2 Manfaat praktis

Manfaat dari penelitian ini dapat di jadikan sebagai pengetahuan tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan Desa.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Peneliti

Pembahasan mengenai batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah pada pokok permasalahan yang dibahas peneliti, oleh karena itu diharapkan penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang ditetapkan. Peneliti membatasi penelitian ini pada :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada kantor Desa Baramamase, Desa Lalong dan Desa Batusitanduk
2. Data penelitian ini berasal dari aparat Desa Baramamase, Desa Lalong dan Desa Batusitanduk melalui kuesioner

1.6 Sistematika Penulisan

Gambaran penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab diantaranya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang *sterdship theory*, *good governance*, tata kelola pemerintahan desa, kerangka konseptual dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrument penelitian, deskripsi datadan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian dan pembahasan data yang diperoleh

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Stewardship Theory*

Stewardship theory dapat diterapkan pada penelitian akuntansi untuk organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintah (Morgan, 1996; David, 2006 dan Thorton, 2009 dalam Wahida, 2016) dan organisasi nirlaba lainnya (Vargas, 2004; Caers Ralf, 2006 dan Wilson, 2010). dalam Wahida, (2010). 2016) yang sejak awal perkembangannya, akuntansi untuk organisasi sektor publik telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan data untuk koneksi antara pelayan dan prinsipal. Akuntansi karena penggerak transaksi bergerak ke arah yang semakin kompleks dan diikuti oleh perluasan spesialisasi di bidang akuntansi dan oleh karena itu berkembangnya organisasi sektor publik. Dengan berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (pemasok modal/*principals*) mempercayakan (*trust* = amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward* = manajemen) yang lebih mampu dan siap. Hubungan kontraktual antara stewards dan prinsipal pada gagasan kepercayaan (amanah = kepercayaan), bertindak secara kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang dapat diterima dalam kasus organisasi sektor publik adalah teori *stewardship*.

Teori *stewardship* selama penelitian ini, dapat menjelaskan keberadaan Pemerintah Desa sebagai lembaga yang akan dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan umum dengan mengakhiri tugas dan fungsinya secara tepat,

menjadikan pertanggungjawaban keuangan yang dipercayakan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, manajemen (steward) mengarahkan seluruh kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian internal sehingga dapat menyediakan laporan informasi keuangan yang berkualitas.

2.1.2 Good Governance

Good governance di Indonesia diartikan sebagai pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa. *Good governance* berasal dari dua kata yang diambil dari bahas inggris, yaitu *good and governance* dimana *good* berarti nilai-nilai yang menjunjung tinggi kebutuhan rakyat, kemandirian, aspek fungsional, dan pemerintahan yang efektif dan efisien. Sedangkan *governance* memiliki arti semua mekanisme, proses, dan institusi dimana warga Negara dan kelompok masyarakat mengekspresikan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan memenuhi perbedaanya (Prameswari, 2020)

World Bank mendefinisikan tata kelola yang baik karena pelaksanaan manajemen atau manajemen yang solid dan akuntabel dalam pemerintahan dan didukung prinsip-prinsip pasar yang efisien juga karena penjegahan korupsi baik secara administrative maupun politik. Ini dalam sektor pemerintah atau sektor swasta merupakan inofasi mutlak atau tindakan dalam upaya untuk membentuk kredibilitas manajerial publik yang handal. *Good governance* hadir sebagai berbagai solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi selama ini di suatu Negara. Tata kelola yang baik membantu mengintergrasikan peran pemerinta,

sector swasta, dan oleh karena itu masyarakat untuk mewujudkan konsensus yang khas, di mana pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan efektif dan efisien. Dengan memperhatikan nilai-nilai dan cara kerja *good governance*, maka akan meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam implementasi kebijakan karena program-program yang ditetapkan didukung oleh keputusan bersama (Handayani dan Nur, 2019).

Good governance adalah terselenggaranya manajemen pembangunan yang bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi, menghindari salah alokasi aset, dan mencegah korupsi baik secara politik maupun administratif. Tata kelola yang baik menegakkan disiplin anggaran dan menciptakan kerangka hukum dan politik untuk perluasan kegiatan bisnis. Tata kelola yang baik didasarkan pada konsep bahwa strategi untuk mencapai keputusan dan implementasinya di pertanggungjawabkan bersama. Sebagai konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan juga swasta untuk penyelenggaraan negara selama bernegara (Herdiwinoto, 2017).

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendefinisikan pemerintahan karena proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan ketersediaan barang dan jasa publik. LAN juga menekankan bahwa dari aspek fungsional, pemerintahan sering dilihat dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mewujudkan tujuan yang digariskan atau sebaliknya, dengan menjaga sinergi interaktif yang konstruktif antara domain negara, swasta, dan masyarakat (Pratama, 2020).

Good governance adalah tindakan atau perilaku yang didukung oleh nilai-nilai yang mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi isu-isu publik untuk menilai nilai-nilai tersebut ke dalam tindakan standar hidup. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa *good governance* tidak hanya terbatas pada birokrasi pemerintah tetapi juga melibatkan masyarakat sipil yang diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan juga melibatkan sektor swasta. Jadi, istilah *good governance* tidak hanya ditujukan kepada penyelenggara negara atau pemerintahan, tetapi juga kepada publik akhir dan pihak pribadi di luar birokrasi yang terus menerus menuntut terselenggaranya *good governance* di dalam Negara (Prameswari, 2020).

Tujuan *good governance*

Tujuan utama dari *good governance* adalah untuk mewujudkan kondisi pemerintahan, siap melindungi kepentingan pelayanan publik secara seimbang, para pihak atau pemangku kepentingan yang terlibat seperti negara, masyarakat sipil dan sektor swasta. Munculnya istilah *good governance* ini tentunya juga diindikasikan sehingga akan terjadi perubahan yang luas dalam pemerintahan. Pemerintah tidak harus melakukan semuanya sendiri tetapi hanya sebagai penyedia fasilitas dan koordinat. Pelaksanaan *government* atau *good governance* pada hakikatnya membagi peran, hal ini dapat dilakukan agar tidak terjadi monopoli. Pihak-pihak yang terlibat dalam *good governance* adalah pemerintah, masyarakat dan juga swasta. Adanya *good governance* diharapkan mampu menyeimbangkan peran masing-masing pihak yang terlibat agar seimbang dan

searah, yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik dan efisien serta bertanggung jawab (Hardiansyah, 2011).

Tata kelola yang baik dapat diwujudkan melalui upaya sinergi antara masyarakat sipil, sektor publik umum, dan oleh karena itu sektor swasta dalam mengelola sumber daya alam, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Tata pemerintahan yang baik minimal harus siap untuk mewujudkan keinginan partisipasi, efisiensi dan efektivitas, transparansi, dan keadilan (Handayani dan Nur, 2019).

2.1.2.2 Prinsip - prinsip *good governance*

Prinsip -prinsip penyelenggaraan *good governance*, yaitu:*pertama* Partisipasi masyarakat adalah semua masyarakat memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, *kedua* Penegakan hukum yang bersifat adil dan berlaku pada semua masyarakat tanpa pandang bulu. Termasuk penegakan hukum yang menyangkut hak asasi manusia, *ketiga* Transparansi adalah seluruh informasi tentang proses pemerintahan harus memadai dan jujur sehingga dapat dimengerti, diakses dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat, *keempat* Daya tangkap adalah lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan tanpa diskriminasi, *kelima* Berorientasi consensus adalah menjabatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu consensus yang menyeluruh tentang apa yanterbaik bagi masyarakat dan tentang kebijakan-kebijakan serta prosedur-prosedur, *keenam* Berkeadilan adalah semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan

mereka, *ketujuh* Efektivitas dan efisiensi adalah seluruh proses lembaga dan pemerintahan harus mampu menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi kerja, *kedelapan* Akuntabilitas adalah seluruh pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan lembaga-lembaga yang berkepentingan, *kesembilan* Bervisi strategi adalah para pemimpin harus memiliki prospektif luas dan jauh ke depan tentang tata pemerintahan dan pembangunan manusia. Selain itu, para pemimpin juga harus memiliki kepekaan tentang apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut serta harus mempunyai pemahaman atas kesejahteraan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut dan *kese puluh* Saling berkaitan adalah seluruh prinsip *good governance* yang telah disebutkan di atas saling memperkuat dan saling terkait serta tidak dapat berdiri sendiri (Herdiawanto, 2019)

Prinsip - prinsip ini dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja pemerintah dalam mengelola pemerintahan. Prinsip-prinsip yang ada pada *good governance* yang diusung oleh *World Bank* dan UNDP yaitu: *pertama* Partisipasi masyarakat yaitu keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan lembaga-lembaga yang sah untuk mengakomodir kepentingan warga masyarakat. Partisipasi masyarakat dibangun berdasarkan prinsip kebebasan yang adil dan santun. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat akan membuat suatu kebijakan menjadi lebih hidup, karena memiliki ruk yang berasal dari lokalitas warga yang bersangkutan, *kedua* Supremasi Hukum yaitu hukum memiliki peranan penting dalam menegakkan

keadilan dan kebenaran. Hukum yang dibuat haruslah bersifat tidak memihak, adil, dan konsisten. Hukum harus diberlakukan tanpa pandang bulu, tidak melihat pada jabatan, materi, dan kekerabatan, *ketiga* Transapari atau biasa diartikan dengan keterbukaan adalah pemerintahan memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi bisa diakses oleh semua warga masyarakat dengan memperhatikan pada ketentuan-ketentuan yang telah dibuat. Informasi haruslah bersifat update dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, *keempat* Stakeholder mempunyai peranan penting dalam membangun kemitraan dengan pemerintahan. Stakeholder disini bisa berkedudukan sebagai pengambil keputusan atau pelaksana program. Stakeholder mempunyai kepentingan tersendiri yang mana seharusnya berjalan selaras dengan kepentingan yang dibangun oleh pemerintah dan masyarakat, *kelima* Berorientasi pada Konsensus Pemerintah memiliki peran sebagai katalisator yakni menjembatani berbagai aspirasi dan kepentingan - kepentingan sehingga nanti bisa didapat sebuah konsesus yang berdasar pada kesepakatan bersama, *keenam* Kesetaraan Seluruh warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama dimata hukum dan untuk mencapai kesejahteraannya. Prinsip kesetaraan akan memacu dampat keadilan dan pembangunan ekonomi yang stabil, karena semua rakyat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan pengembangan diri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, *ketujuh* Efektifitas dan Efisiensi Dalam menjalankan program-program dan kebijakan, pemerintah berpegang pada prinsip efektif dan efesien. Dimana program dikatakan efektif, jika program yang dijalankan dapat

berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Begitupun dengan efisien, artinya pemerintah harus menggunakan anggaran dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan yang akan dilakukan, *kedelapan* Akuntabilitas yaitu segala bentuk kegiatan/program yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban dapat berbedabeda tergantung dari pihak yang terkait. Akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan *kesembilan* Visi strategis merupakan cara pandang yang digagas oleh pemerintah dan masyarakat dalam membangun ekonomi manusia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Visi strategis adalah rancangan kegiatan/program apa yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan negara. Cara pandang yang strategis akan membuat suatu negara untuk mempertahankan eksistensinya. Sedangkan menurut *United National Development Program* (UNDP) prinsip *good governance*, terbagi menjadi 12, yaitu: *pertama* Partisipasi Masyarakat, *kedua* Wawasan ke Depan, *ketiga* Keterbukaan atau Transparansi, *keempat* Demokrasi, *kelima* Profesionalisme dan Kompetensi, *keenam* Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat, *ketujuh* Desentralisasi, *kedelapan* Komitmen pada Lingkungan Hidup, *kesembilan* Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan, *kesepluluh* Profesionalisme dan Kompetensi, *kesebelas* Keefisienan dan Keefektifan, dan *keduabelas* Daya Tanggap (Handayani dan Nur, 2019).

2.1.3 Tata kelola pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 1 ayat 2 tentang Desa yang berbunyi Pemerintahan Desa adalah

penyelenggaraan urusan negara dan juga kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 23 perlu ditegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Dalam pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa pemerintahan desa adalah: kepala desa atau disebut dengan nama lain perangkat desa sebagai komponen pemerintahan desa yang terdiri atas: unsur pimpinan yaitu kepala desa, unsur pembantu kepala desa (aparatur) terdiri atas: sekretariat desa, pimpinan daerah/kepala dusun dan pelaksana teknis/kepala seksi.

Desa merupakan lembaga pemerintahan terkecil yang secara langsung melayani keinginan masyarakat. Saat ini desa diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Karena ADD desa dituntut untuk bisa menghasilkan pendapatan mandiri melalui unit usaha desa yang bernama BUMDesa. Kewenangan dalam pengelolaan keuangan bahkan harus diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dengan sistem kontemporer. Dengan pengelolaan yang baik, konflik antara masyarakat dan pemerintah dapat dihindari (Arsik dan Lawelai, 2020).

Dengan demikian desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan suatu desa, bagaimana bisa dikatakan bahwa dalam suatu negara yang sangat makmur jika desa belum sejahtera, kesejahteraan masyarakat desa dapat menjadi tolak ukur yang nyata. Untuk menentukan besarnya kesejahteraan suatu desa. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang paling baru menimbulkan respon yang beragam dari banyak elemen,

hal mendasar yang dibahas adalah pembagian/pembagian kekuasaan dari tingkat menengah ke tingkat desa, hal lain yang dibahas adalah adanya dana APBN kesepuluh yang akan dikucurkan oleh pemerintah. Untuk setiap desa, jika melihat APBN Indonesia saat ini, setiap desa akan menerima cukup 1 miliar, saya tidak berpikir bahwa ini dapat memberikan angin segar bagi pemerintah desa, namun yang juga kontroversial adalah adanya dana yang begitu besar. Di dalam desa dikhawatirkan akan muncul aktor-aktor korupsi di tingkat desa jika pelaksanaan pemerintahan desa tidak dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam konteks pembuat kebijakan publik yang diwujudkan melalui regulasi, peran aktif dan partisipasi warga negara dalam penyelenggaraan negara dipahami sebagai bentuk inisiatif untuk mengorganisir diri dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kelangsungan hidup, . dan kehidupan mereka. Dengan berlakunya UU Desa dan juga UU Pemerintahan Daerah, akan terlihat bentuk dan praktik peran aktif dan partisipasi warga Desa, antara lain: Penyusunan rencana pembangunan desa/kelurahan, Pengawasan warga terhadap pelayanan publik. praktik, pelibatan warga dalam memantau anggaran pembangunan dan mengkampanyekan terciptanya sistem pemerintahan yang transparan. dan dipersalahkan untuk kepentingan warga negara. Pada tataran implementasi, partisipasi dan partisipasi warga tercermin dalam pembangunan pedesaan. Pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (desa) demikian pula karena kualitas hidup manusia apalagi sebagai pengentasan kemiskinan dialokasikan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar,

pembangunan sarana dan prasarana potensi ekonomi lokal, terutama berkat pembangunan yang berkelanjutan. penggunaan sumber daya alam dan juga lingkungan.

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian ini, dapat dilihat dalam tabel :

Tabel 2.1 Ringkasan penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Peneliti
1.	Priskila (2020)	Analisis penerapan prinsip <i>good government governance</i> terhadap pengelolaan keuangan Desa (study kasus pada Desa Salumakki, kec.Kalumpang kab.Mamuju	Prinsip dari <i>Good Government Governance</i> ini telah diterapkan oleh pemerintah desa Salumakki, namun belum semua Prinsip dari Good Government Governance sudah diterapkan. Prinsip <i>Good Government Governance</i> yang telah diterapkan yaitu prinsip tegaknya supremasi hukum, peduli kepada masyarakat, berorientasi terhadap konsensus, efektif dan efisiensi, dan prinsip fairness (keadilan dan kesetaraan). Sedangkan prinsip yang belum sepenuhnya diterapkan yaitu prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, responsibilitas, dan akuntabilitas.
2.	Rika ardiyanti (2019)	Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa	Pengaruh Transparansi (X1) Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y) Di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa setiap kebijakan dalam

	<p>trhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Remang</p>	<p>pengelolaan dana desa telah dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pemerintah desa. Kinerja pemerintah desa kepada masyarakat dapat dilihat dari kepatuhan pembuatan laporan realisasi dana desa yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta pengaruh atau timbal balik dari hasil pengelolaan desa yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, kepatuhan pemerintah desa terhadap prosedur dan hukum juga akan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah desa akan selalu mematuhi prosedur dan hukum, juga akuntabel dalam pengelolaan dana desa.</p> <p>Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X1) Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y) Di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.</p> <p>Pengaruh Partisipasi (X1), Akuntabilitas (X2), dan Partisipasi Masyarakat (X3) Dalam Pengelolaan Dana Desa</p>
--	---	--

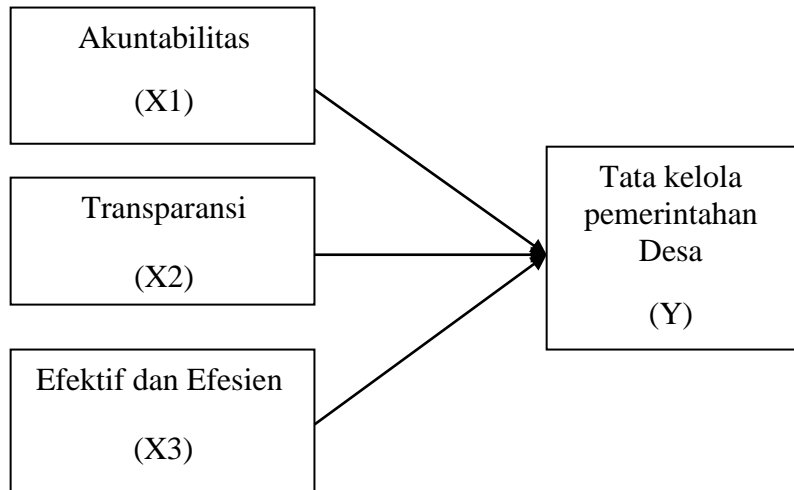
			<p>terhadap Pembedayaan Masyarakat (Y) pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Hasil penelitian pada transparansi dalam pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa pemerintah desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang telah terbuka kepada masyarakat, khususnya dalam pengelolaan dana desa, dibuktikan dengan adanya penyediaan segala informasi di papan pengumuman. Pemerintah Desa Woro juga telah akuntabel, yaitu dengan adanya pemasangan spanduk keuangan di Balai desa sebagai upaya pertanggung jawaban kepada masyarakat mengenai keuangan desa. Selain itu, masyarakat juga telah diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan di desa. Sehingga dengan adanya upaya-upaya tersebut pemberdayaan masyarakat lebih meningkat</p>
3.	Chirsto Astriandy (2018)	<p>Analisis penerapan prinsip <i>good government governace</i> dalam pengelolaan keuangan Desa (studi kasus pada Desa parit Baru, kec.sungai raya kab.kubu raya)</p>	<p>Prinsip dari <i>good governmentgovernance</i> ini telah diterapkan oleh pemerintah desa parit Baru, namun tidak semua prinsip dari <i>good governmentgovernance</i> suda diterapkan sepenuhnya. prinsip <i>good governmentgovernance</i> yang telah diterapkan yaitu prinsip tegaknya supremasi hukum, perduli kepada masyarakat, berorientasi terhadap konsensus, efektif dan efisien, dan prinsip <i>fairness</i> (keadilan dan kesetaraan). Sedangkan prinsip yang belum</p>

			se penuhnya diterapkan yaitu prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, responsibilitas, dan akuntabilitas.
4.	Pratama (2020)	Analisis Prinsip <i>good governance</i> dalam pengelolaan desa	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, penerapan prinsip <i>Good Governance</i> di dalam pengelolaan desa di desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penerapan prinsip <i>Good Governance</i> dalam pengelolaan desa di Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yaitu seperti: masih kurangnya akses informasi yang di berikan masyarakat, tidak bertambahnya wawasan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan desa, kurangnya kritik dan saran yang di berikan untuk pemerintah Desa dan tidak ada laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. 2. Faktor-faktor yang menghambat penerapan prinsip <i>Good Governance</i> dalam pengelolaan Desa di Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yaitu: SDM yang kurang Mempuni, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya transparansi dalam pengelolaan desa dan tidak sesuainya pembangunan.

5.	Selfianti faisal Arsik dan Hermawan Lawelai (2020)	Penerapan Akuntabilitas, efektivitas dan Transparansi Dalam mewujudkan good governance. Studi pada pemerintah Desa Banabungi	Penelitian ini menganalisa prinsip-prinsip <i>good governance</i> dengan indikator; akuntabilitas, efektivitas dan transparansi. Studi ini menemukan bahwa indikator-indikator ini telah diimplementasikan meliputi efektivitas dan efisiensi, keterbukaan dan transparansi, dan akuntabilitas di Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton Selatan. Secara umum bisa dikatakan bahwa pemerintah Desa Banabungi, di Kecamatan Pasarwajo telah mengadopsi sistem pemerintahan sesuai peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berbagai indikator sudah mulai diterapkan meski belum secara keseluruhan, dan bahkan belum ada desa yang menerapkan prinsip-prinsip <i>good governance</i> . Beberapa indikator masih perlu dikembangkan lebih lanjut agar administrasi pemerintah meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian ekonomi dari masyarakat desa
----	---	--	--

1.1 kerangka konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan konstruksi logika yang telah di atur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti, dimana hal ini membantu peneliti menguraikan secara sistematis permasalahan dalam penelitian. Maka kerangka konseptual dari penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 kerangka konseptual

1.2 Hipotesis

Hipotesis memberikan pernyataan tentang hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih yang akan diuji secara empiris, hipotesis ini menjadi dugaan sementara dari penelitian ini. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Prinsip Akuntabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola pemerintahan Desa.

H2: Prinsip Transparansi mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan Desa.

H3: Prinsip Efektif dan Efisien mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode survei, yaitu penelitian yang berkaitan dengan angka-angka dan dapat diukur untuk melihat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent berdasarkan data yang ada dan dikombinasikan dengan analisis atau deskripsi situasi atau kejadian yang ada.

3.2 Lokasi dan waktu peneliti

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah kantor Desa Baramamase, Desa Lalong dan Desa Batusitanduk di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu. Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama dua bulan.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2019) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu Desa yang ada di Kecamatan Walenrang sebanyak 9 desa.

Menurut Sugiyono(2019) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Jumlah desa yang ada di Kecamatan Walenrang yang menjadi sampel sebanyak 3

desadengan responden sebanyak 48. Sedangkan pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mengacu pada kriteria sebagai berikut:

1. Desa yang telah berdiri selama 5 tahun
2. Desa yang melaporkan laporan keuangannya setiap tahun
3. Desa yang memiliki kinerja terbaik yang mendapatkan tambahan dana desa, diantaranya pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa, dan capaian hasil pembangunan desa.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Data tersebut berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner.

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari responden di kantor desa yang ada di Kecamatan Walenrang, sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan dimanfaatkan oleh penelitian untuk kebutuhan penelitian yang dilakukannya.

Untuk menguji kebenaran penulisan ini, maka sumber data yang dipergunakan penulis yaitu Data primer, data yang diperoleh langsung dari responden di Kantor desa yang ada di Kecamatan Walenrang. Data ini merupakan respon tertulis aparat desa yang berhubungan dengan Kantor desa yang ada di Kecamatan Walenrang yang menjadi sampel penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner (angket) yang berisi pertanyaan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Peneliti menggunakan kuesioner langsung, dimana kuesioner ini diantar langsung kepada responden kantor Desa Baramamase, Desa Lalong dan Desa Batusitanduk.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Ada 4 variabel pada penelitian ini yaitu akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi, dan tata kelola pemerintahan desa.

Menurut Sugiyono (2019) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Adapun penjelasannya sebagai berikut :

3.6.1 Variabel Independen (X)

Menurut Sugiyono (2019) variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen sering disebut juga sebagai variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel independennya adalah akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisien.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang

berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi manfaat (principal)(Mahmudi,2016).

Transparansi adalah Keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2016)

Efektif adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif Sedangkan Efesien adalah sebuah ukuran untuk membandingkan rencana penggunaan input dengan penggunaan yang diwujudkan(Mardiasmo, 2017).

3.6.2 Variabel Dependen (Y)

Menurut Sugiyono (2019) variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel ini sering disebut variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah tata kelola pemerintahan desa.

Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat 2 tentang desa yang berbunyi Pemerintah desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.7 Instrumen penelitian

Instrumen yang digunakan pada penelitian kali ini adalah kuisisioner, yaitu teknik struktur untuk memperoleh data yang terdiri dari serangkaian pertanyaan

tertulis atau variabel yang dijawab responden. Kuisisioner dalam penelitian ini dibuat melalui pertanyaan - pertanyaan sesuai dengan variabel yang akan diteliti.

Tabel 3.1 Alternatif penilaian responden dengan skala likert

Simbol	Alternatif Penilaian	Nilai
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
N	Netral	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

3.8 Deskripsi Data

Responden dalam penelitian ini adalah aparat desa yang berkerja di kantor desa kecamatan walenrang meliputi Desa Baramamase, Desa Lalong dan Desa Batustanduk. Pada penelitian ini peneliti mendapatkan data melalui kuesioner yang di bagikan pada seluruh aparat desa di kantor Desa Baramamse, Desa Lalong dan Desa Batusitanduk sebanyak 55 kuesioner dan jumlah kuesioner yang diisi dan dikembalikan sebanyak 48 atau tingkat pengembalian data kuesioner sebanyak 87%. Adapun rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Penelitian Data Primer Penelitian

No	Keterangan	Jumlah kuesioner	Persentase (%)
1	Distribusi kuesioner	55	100%
2	Kuesioner kembali	48	87%
3	Kuesioner cacat/tidak kembali	7	13%
4	Kuesioner yang dapat diolah	48	87%
n = sampel yang kembali			
Responden rate = $\frac{48}{55} \times 100\%$			
55			
= 87%			

Sumber data : data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner, ada 48 orang yang bekerja di kantor Desa Baramamse, Desa Lalong dan Desa Batusitanduk yang berhasil dikumpulkan sebagai responden dalam melakukan penelitian ini. Maka diperoleh data kelompok jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 3.3 Jenis kelamin Responden

No	Jenis kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	37	77%
2	Perempuan	11	23%
	Jumlah	48	100%

Sumber: Data primer diolah, 2021

Pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 48 responden dalam penelitian ini, terdapat responden laki-laki sebanyak 37 orang, dan responden perempuan sebanyak 11 orang. Artinya, responden dalam dalam penelitian ini didominasi oleh laki-laki.

Tabel 3.4Usia Responden

Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah Responden (orang)	Presentase (%)
17 – 30	2	4%
31 – 45	20	42%
46 – 60	26	54%
Jumlah	48	100%

Sumber data: data primer diolah, 2021

Pada data dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 48 responden dalam penelitian ini, terdapat responden dengan kelompok umur mulai dari 17-30 tahun sebanyak 2 responden, kelompok umur 31-45 tahun sebanyak 20 responden, dan kelompok 46-60 tahun sebanyak 48 responden. Dalam penelitian ini, kelompok umur yang dikatakan produktif telah menjawab pertanyaan maupun pernyataan dalam kuesioner ini, yaitu dengan usia yang berkisar antara 17 tahun sampai 60 tahun, yaitu usia sebelum memasuki masa pensiun. Responden dapat menjawab isi dari kuesioner dengan tepat yang telah di bagikan.

Tabel 3.5 Pendidikan Responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Presentase
1	S1	6	12,5%
2	SMA/SLTA/SMK	42	87,5%
	Jumlah	48	100%

Sumber data: data primer diolah, 2021

Pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 48 responden dalam penelitian ini, terdapat pendidikan terakhir responden dengan kelompok pendidikan terakhir S1 sebanyak 6 responden dan kelompok pendindika terakhir SMA/SLTA/SMK sebanyak 42 Responden. Dalam penelitian ini, kelompok pendidikan terakhir yang dikatakan produktif telah menjawab pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner ini, yaitu dengan pendidikan terakhir SMA/SMK

sampai S1 dapat menjawab dengan tepat isi dari kuesioner yang telah dibagikan.

3.8.1 Uji Kualitas Data

3.8.1.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner, suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan yang ada pada koesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan di ukur oleh kuesioner tersebut. Di dalam penelitian ini pengujian validitas akan dilakukan dengan menggunakan *Pearson correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang telah diperoleh dari sejumlah pertanyaan-pertanyaan, apabila Sig.(2-tailed) yang dapat memiliki nilai dibawah 0,05 artinya bahwa data yang telah diperoleh adalah valid (Ghozali, 2009).

3.8.1.2 Uji Reabilitas

Dalam uji reliabilitas mampu menunjukkan konsistensi dari data-data yang telah dikumpulkan, suatu kuesioner dikatakan handal jika jawaban dari pertanyaan seseorang konsisten dan tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu (Ghozali, 2009), uji reliabilitas ini hanya akan dilakukan setelah suatu instrument telah dipastikan validitasnya. Cara mengukur reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan *caraone shot* atau pengukuran sekali saja. Disini pengukuran yang dilakukan hanya sekali dan setelah itu hasilnya di bandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Kriteria dari pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengujian *Cronbach Alpha* > 0,60 Nunnaly, 1960 dalam (Ghozali, 2009).

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

3.8.2.1 Uji Normalitas data

Uji normalitas yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau *residual* mempunyai distribusi normal. Seperti yang diketahui, bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai *residual* mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi maka hasil uji statistik menjadi tidak valid khususnya untuk ukuran sampel kecil. Ada dua cara yang digunakan untuk mendeteksi apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik merupakan cara termudah akan tetapi bisa menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting (titik-titik) yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonalnya.

3.8.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas merupakan bentuk pengujian untuk asumsi dalam analisis regresi berganda. Multikolinieritas terjadi apabila terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen dalam model regresi.

3.8.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidak samaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain.

3.8.3 Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu metode yang digunakan dalam mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dengan melihat

kerangka pemikiran teoritis, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan efektif dan efisien terhadap tata kelola Pemerintahan Desa. menggunakan analisis regresi berganda.

3.8.3.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan matematis antara variabel dependen (Y) dengan satu atau beberapa variabel independen (X). Hubungan matematis digunakan sebagai suatu model regresi yang digunakan untuk meramalkan atau memprediksi nilai (Y) berdasarkan nilai (X) tertentu. Dengan analisis regresi akan di ketahui variabel independen yang benar-benar signifikan mempegaruhi variabel dependen dan dengan variabel yang signifikan tadi dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen. Hubungan matematis dapat di gambarkan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = tata kelolah Pemerintahan Desa

a = konstanta

b₁,b₂,b₃ = koefisien regresi

X₁ = transparansi

X₂ = akuntabilitas

X₃ = efektif dan efisien

e = standar Error

3.8.4 Uji Hipotesis

3.8.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) merupakan seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, nilai R^2 yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan dalam memprediksi variabel independen (Ghozali, 2005).

3.8.4.1 Uji Parsial (t)

Uji parsial t digunakan untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel dependen digunakan tingkat signifikan 0,05 jika nilai t terhitung lebih kecil dari nilai t tabel pada taraf signifikan 0,05 maka H_a ditolak, sedangkan jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka H_a diterima (Ghozali, 2005).

3.8.4.2 Uji Simultan (F)

Uji simultan F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen. Uji statistik F dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2005).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum obyek Penelitian

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu. Kecamatan Walenrang merupakan Kecamatan yang unik bersama dengan 5 Kecamatan lainnya yaitu Walenrang Barat, Walenrang Timur, Lamasi dan Lamasi Timur. Dikarenakan induk ibu kota Kabupatennya berada diantara kota/kabupaten yang lain, jarak antara ibu kota Kabupaten dengan Kecamatan ini cukup jauh yaitu sekitar 100 Km dan harus melewati 1 kota yang lain untuk menempuhnya dan ditempuh dalam waktu 2 jam. Di Kecamatan Walenrang terdapat 9 desa/kelurahan yaitu Desa Baramamase, Desa Batusitanduk, Kelurahan Bulo, Desa Harapan, Desa Kalibamamase, Desa Lalong, Desa Saragi, Desa Tombang dan Walenrang.

Data yang telah diolah yaitu menggunakan metode *purposive sampling* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*, terdapat 9 desa yang ada di kecamatan walenrang, namun dalam penelitian ini ada 6 desa dieliminasi yang tidak memenuhi kriteia yaitu Desa Harapan, Desa Kalibamamase, Desa Saragi, Desa Tombang, Kelurahan Bulo dan Desa Walenrang. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini ada 3 desa yang memenuhi kriteria yaitu Desa Baramamase, Desa Lalong dan Desa Batusitanduk.

4.2 Deskripsi Statistik

4.2.1 Uji Kualitas Data

4.2.1.1 Uji Validitas

Setelah mendapatkan data dari kuesioner, untuk menguji apakah kuesioner tersebut valid atau tidak, maka dilakukan uji validitas ini. Dalam penelitian ini, untuk mengukur validitas suatu data dilaksanakan dengan menggunakan bantuan dari program SPSS versi 25. Kriteria yang digunakan untuk mengukur validitas data ini adalah:

1. Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan degree of freedom (df) adalah n (jumlah sampel) $- 2$, maka item kuesioner tersebut valid.
2. Sebaliknya, apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$ dengan df adalah $n - 2$, maka item tersebut dikatakan tidak valid.

Hasil r_{hitung} dari 5 pertanyaan (X1), 5 pertanyaan (X2), 5 Pertanyaan (X3) dan 5 pertanyaan (Y) sehingga dalam kuesioner penelitian pada variable independen yaitu Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Efektif dan Efesien (X3) dan variable dependen yaitu Tata kelola Pemerintahan Desa. Variable tersebut dinyatakan valid apabila memiliki nilai $r_{hitung} > r_{table}$. Df dihitung dengan $df = 48 - 2 = 46$. Sedangkan tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5 %. Sehingga, $r_{tabel} = r(46;0,05) = 0,291$. Hal tersebut dapat dilihat pada penyajian validitas setiap variabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r table	Keterangan
Akuntabilitas	X1.1	0,685	0,291	Valid
	X1.2	0,508	0,291	Valid
	X1.3	0,295	0,291	Valid
	X1.4	0,344	0,291	Valid
	X1.5	0,459	0,291	Valid
Transparansi	X2.1	0,677	0,291	Valid
	X2.2	0,807	0,291	Valid
	X2.3	0,818	0,291	Valid
	X2.4	0,816	0,291	Valid
	X2.5	0,387	0,291	Valid
Efektif dan Efisien	X3.1	0,684	0,291	Valid
	X3.2	0,750	0,291	Valid
	X3.3	0,763	0,291	Valid
	X3.4	0,804	0,291	Valid
	X3.5	0,459	0,291	Valid
Tata kelola Pemerintahan Dea	Y1	0,635	0,291	Valid
	Y2	0,803	0,291	Valid
	Y3	0,741	0,291	Valid
	Y4	0,722	0,291	Valid
	Y5	0,491	0,291	Valid

Sumber data: Lampiran 3, diolah (2021)

Berdasarkan pada tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan untuk semua variabel dinyatakan valid, karena *Corrected Item Correlation* > dari r_{tabel} pada signifikan 0,05 (5%).

4.2.1.2 Uji Reliabilitas Data

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari responden itu stabil dari waktu ke waktu. Nilai ketentuan untuk mengukur

reliabilitas dengan uji statistic *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk dapat dinyatakan reliabel jika *Cronbach Alpha* $> 0,6$.

Tabel 4.2
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	<i>Alpha Cronbach's</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	0,775	0,60	Reliabel
Transparansi (X2)	0,637	0,60	Reliabel
Efektif dan Efisien (X3)	0,764	0,60	Reliabel
Tata kelola Pemerintahan Desa	0,760	0,60	Reliabel

Sumber data: Lampiran 4, diolah (2021)

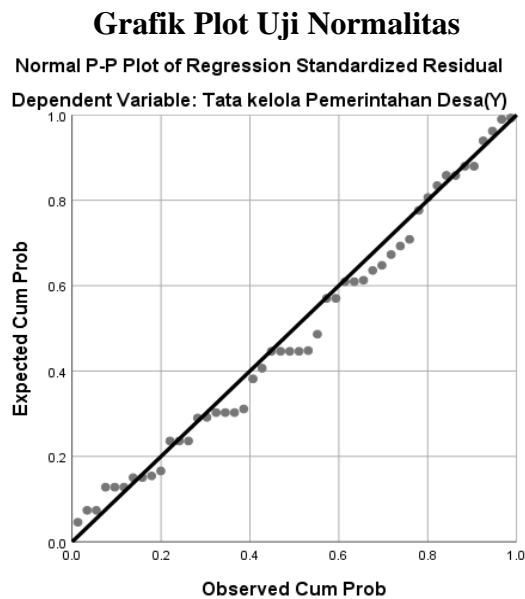
Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah reliabel karena secara keseluruhan variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* yang lebih besar dari 0,6 sehingga layak digunakan sebagai alat ukur instrument kuesioner dalam penelitian ini.

4.2.2 Uji Asumasi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting (titik-titik) yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonalnya. Syarat dari uji normalitas yaitu model regresi harus terdistribusi normal.

Gambar 4.1



Sumber data: Lampiran 5, diolah (2021)

Pada gambar 4.1 menunjukkan hasil uji normalitas pada grafik normal *p-plot*. Pada gambar grafik normal *p-plot*, bahwa titik-titik menyebar dan mengikuti garis diagonalnya. Sehingga, grafik ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Selain dengan menggunakan grafik, uji normalitas dalam penelitian ini juga menggunakan uji statistik Kolmogorov Smirnov, berikut hasil yang diperoleh dalam penelitian ini:

Tabel4.3
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.08052438
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.096
	Negative	-.058
Test Statistic		.096
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber data: Lampiran 5, diolah(2021)

Hasil uji Kolmogorov Smirnov di atas menunjukkan nilainya sebesar 0,096 dan dengan nilai signifikansi sebesar 0,200. Hal tersebut berarti membuktikan bahwa data residual telah terdistribusi dengan normal, karena telah memenuhi syarat yaitu nilai signifikansi harus lebih dari 0,05. Oleh karena itu, hasil uji ini telah konsisten dengan uji sebelumnya.

4.2.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji *multikolonieritas* ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Sehingga, untuk mengetahui hal tersebut, berikut hasil dari uji multikolonieritas dalam penelitian ini:

Tabel 4.4
Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	13.829	4.288		3.225	.002		
	Akuntabilitas(X1)	.466	.152	.520	3.072	.004	.601	1.663
	Transparansi(X2)	-.113	.227	-.075	-.496	.622	.762	1.312
	Efektif dan Efisien(X3)	-.005	.179	-.005	-.027	.979	.548	1.825

a. Dependent Variable: Tata kelola Pemerintahan Desa(Y)

Sumber data: Lampiran 5, diolah (2021)

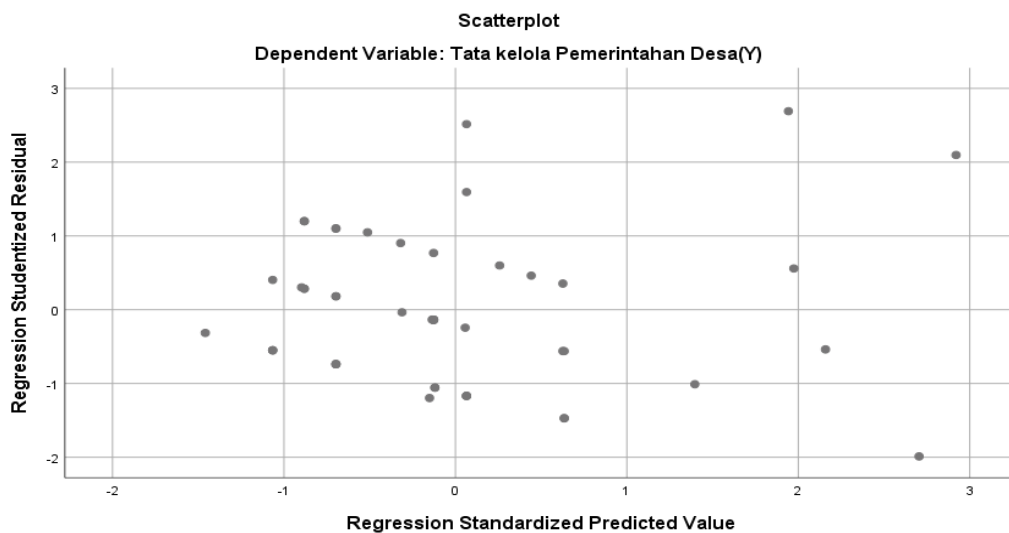
Berdasarkan hasil dari uji *multikolonieritas* yang dapat dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* yang diperoleh dari masing-masing variabel adalah <1,000. Besar *tolerance* yang dimiliki oleh variabel tersebut adalah, variabel akuntabilitas sebesar 0,601, variabel transparansi sebesar 0,762, dan variabel efektif dan efisien sebesar 0,548. Sehingga, nilai tersebut dapat memenuhi syarat bahwa agar tidak terjadi korelasi antar variabel independen, maka nilai *tolerance* dari masing-masing variabel harus <1,000.

Selain itu, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dalam penelitian ini adalah akuntabilitas sebesar 1,663 transparansi sebesar 1,312 dan untuk efektif dan efisien sebesar 1,825. Oleh karena itu, nilai tersebut juga telah memenuhi syarat lainnya dari uji *multikolonieritas* ini bahwa nilai dari VIF harus > 0,1. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas antar variabel independen dalam penelitian ini.

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilaksanakan untuk menguji apakah di dalam model regresi dalam penelitian terjadi ketidaksamaan variance residual dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain. Jika dalam variance residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut sebagai *homoskedastisitas*. Akan tetapi apabila dalam pengamatan yang satu ke pengamatan yang lainnya berbeda, maka disebut sebagai heteroskedastisitas. Penelitian yang baik adalah penelitian yang menggunakan model regresi yang baik, yaitu dengan menggunakan model regresi yang *homoskedastisitas* atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil pelaksanaan uji heteroskedastisitas:

Gambar 4.2
Uji Heteroskedastisitas



Sumber data: Lampiran 5, diolah (2021)

Dari hasil uji yang telah dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memiliki heteroskedastisitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan

adanyatitik-titik yang tersebar secara acak pada sumbu Y dan diatas maupun dibawahangka 0.

4.2.3 Analisi Data

4.2.3.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabelindependen yaitu akuntabilitas, transparansi, dan efektif dan regesian terhadap variabel dependen yaitu tata kelola Pemerintahan Desa.Adapun hasil uji analisis regresi berganda disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	13.829	4.288		3.225	.002		
	Akuntabilitas(X1)	.466	.152	.520	3.072	.004	.601	1.663
	Transparansi(X2)	-.113	.227	-.075	-.496	.622	.762	1.312
	Efektif dan Efisien(X3)	-.005	.179	-.005	-.027	.979	.548	1.825

a. Dependent Variable: Tata kelola Pemerintahan Desa(Y)

Sumber data: Lampiran 6, diolah(2021)

Dari tabel hasil analisis regresi berganda di atas, diperoleh koefisien variabel bebas X1 (akuntabilitas) sebesar 0,466, koefisien variabel bebas X2 (transparansi) sebesar 0,113, dan koefisien variabel bebas X3 (efektif dan efisien) adalah sebesar 0,005. Oleh karena itu, persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = a + b_1X_1 - b_2X_2 - b_3X_3 + e$$

$$Y = 13,829 + 0,466X_1 - 0,113X_2 - 0,005X_3 + e$$

- a. Nilai konstanta untuk persamaan regresi berdasarkan perhitungan statistik diatas sebesar 13,829 artinya apabila variabel bebas bernilai nol maka tata kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Walenrang sebesar 13,829 satuan.
- b. Nilai koefisien (b_1) Sebesar 0,466 menunjukkan bahwa pengaruh akuntabilitas (X1) terhadap tata kelola Pemerintahan Desa (Y) adalah positif, artinya setiap peningkatan variabel akuntabilitas sebesar satu satuan maka tata kelola Pemerintahan Desa akan mengalami kenaikan sebesar 0,466 satuan.
- c. Nilai koefisien (b_2) Sebesar 0,113 menunjukkan bahwa pengaruh transparansi (X2) terhadap tata kelola Pemerintahan Desa (Y) adalah negatif, artinya setiap peningkatan variabel transparansi sebesar satu satuan maka tata kelola Pemerintahan Desa akan mengalami penurunan sebesar 0,267 satuan.
- d. Nilai koefisien (b_3) Sebesar 0,005 menunjukkan bahwa pengaruh efektif dan efisien (X3) terhadap tata kelola Pemerintahan Desa (Y) adalah negatif, artinya setiap peningkatan variabel efektif dan efisien sebesar satu satuan maka tata kelola Pemerintahan Desa akan mengalami penurunan sebesar 0,005 satuan.

4.2.4 Uji Hipotesis

4.2.4.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.6
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.493 ^a	.243	.191	1.11675
a. Predictors: (Constant), Efektif dan Efisien(X3), Transparansi(X2), Akuntabilitas(X1)				
b. Dependent Variable: Tata kelola Pemerintahan Desa(Y)				

Sumber data: Lampiran 7, diolah (2021)

Berdasarkan tabel output SPSS model summary di atas, besarnya adjusted R2 adalah 0,191 atau sebesar 19,1%. Hal tersebut berarti variasi tata kelola Pemerintahan Desa dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebesar 19,1%. Sedangkan sisanya yang sebanyak 80,9% ($100\% - 19,1\% = 80,9\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model dan/atau di luar variabel dalam.

4.2.4.2 Uji Parsial (t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial (sendiri) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

- Jika nilai signifikan $< 0,05$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
- Jika nilai signifikan $> 0,05$ atau $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Tabel 4.7
Uji Parsial (t)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	13.829	4.288		3.225	.002		
	Akuntabilitas(X1)	.466	.152	.520	3.072	.004	.601	1.663
	Transparansi(X2)	-.113	.227	-.075	-.496	.622	.762	1.312
	Efektif dan Efisien(X3)	-.005	.179	-.005	-.027	.979	.548	1.825

a. Dependent Variable: Tata kelola Pemerintahan Desa(Y)

Sumber data: Lampiran 7, diolah (2021)

Dari hasil pengujian uji t di atas yang menggunakan program SPSS, dapat disimpulkan bahwa:

Pengujian hipotesis pertama (H1): Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y adalah sebesar $0,004 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,072 > t$ tabel $2,0153$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dimana variabel X1 berpengaruh terhadap variabel Y.

Pengujian hipotesis kedua (H2): Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y adalah sebesar $0,622 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,496 < t$ tabel $2,0153$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak dimana variabel X2 tidak berpengaruh terhadap variabel Y.

Pengujian hipotesis ketiga (H3): Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh variabel X3 terhadap variabel Y adalah sebesar $0,979 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,027 > t$ tabel $2,0153$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak dimana Variabel X3 tidak berpengaruh terhadap variabel Y.

4.2.4.3 Hasil Uji Simultan (F)

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan (bersama-sama) yang diberikan variabel independen (X) kepada variabel dependen (Y) dengan tingkat signifikan $0,05$. Berdasarkan nilai signifikansi (Sig) dari output Anova yaitu sebagai berikut:

- a. Jika nilai sig $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Artinya bahwa akuntabilitas (X1), transparansi (X2) dan efektif dan efesiens (X3) secara simultan berpengaruh terhadap Tata kelola Pemerintahan Desa (Y).
- b. Jika nilai sig $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Artinya bahwa secara

akuntabilitas (X1), transparansi (X2) dan efektif dan efisiensi (X3) secara simultan berpengaruh terhadap Tata kelola Pemerintahan Desa (Y).

Tabel 4.8
Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17.605	2	5.868	4.705	.004 ^b
	Residual	54.874	44	1.247		
	Total	72.479	47			
a. Dependent Variable: Tata kelola Pemerintahan Desa(Y)						
b. Predictors: (Constant), Efektif dan Efisien(X3), Transparansi(X2), Akuntabilitas(X1)						

Sumber data: Lampiran 7, diolah (2021)

Pengujian hipotesis keempat (H4): Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikan untuk X1, X2 dan X3 berpengaruh secara simultan terhadap Y yaitu sebesar $0,004 < 0,05$ dan nilai F hitung $4,750 > 2,81$ (F tabel). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima dimana terdapat pengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y.

4.3 Pembahasan dan Diskusi hasil penelitian

4.3.1 Pengaruh akuntabilitas terhadap tata kelola Pemerintahan Desa

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial variable akuntabilitas (X1) berpengaruh signifikan terhadap tata kelola Pemerintahan Desa (Y) di kecamatan Walenrang. Hal ini dapat dilihat pada table 4.7 yang menunjukkan hasil signifikan sebesar 0,004 atau dibawah tingkat signifikan 0,05 sehingga dengan begitu hipotesis pertama (H1) diterima dimana tingkat akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tata kelola Pemerintahan Desa.

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa akuntabilitas berpegaruh terhadap tata kelola Pemerintahan desa. Dari hasil penelitian tersebut diartikan bahwa prinsip akuntabilitas dapat menciptakan kekuatan internal dan memberikan jaminan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah desa lebih berpihak kepada kepentingan publik. setiap kebijakan dalam tata kelola Pemerintahan desa telah dipertanggungjawabkan dengan baik oleh Pemerintah desa di kecamatan walenrang. Kinerja pemerintah desa kepada masyarakat dapat dilihat dari kepatuhan pembuatan laporan realisasi dana desa yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarnya, serta dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, kepatuhan pemerintah desa terhadap prosedur dan hukum juga akan mendorong terciptannya pemerintah desa yang baik dan bersih dari korupsi. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah desa akan selalu mematuhi prosedur, hukum, dan juga akuntabel.

Penelitian ini sejalan dengan *stewardship theory* yang dapat menjelaskan eksistensi Pemerintahan Desa sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggung jawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka manajemen (*stewards*) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian yang sejalan dengan penelitian ini yaitu: *pertama* penelitian yang dilakukan oleh Ardiyanti (2019) yang menunjukkan bahwa hasil analisis dan hasil uji hipotesis yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini juga menyatakan bahwa setiap kebijakan dalam pengelolaan dana desa telah dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pemerintah desa, *kedua* Penelitian yang dilakukan oleh Hutepea dan Aysa (2017) menyatakan bahwa prinsip akuntabilitas telah berjalan atau dilaksanakan dengan baik dan sudah terlaksana di kecamatan Adiankoting terlihat dari pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang diserahkan kepada camat setiap triwulannya dalam setahun, *ketiga* penelitian yang dilakukan oleh Arsik dan Lawelai (2020) Dari penelitian yang dilakukan analisis terhadap akuntabilitas ditemukan bahwa Desa Banabungi telah akuntabel dalam kebijakan keuangan. Hal ini dapat diperkuat melalui sosialisasi tentang persiapan laporan pertanggungjawaban dan penetapan kebijakan desa untuk diwujudkan desa administratif yang tertib sehingga mereka dapat memperhitungkan keuangan dan kebijakan diambil dan juga mewakili masalah masyarakat dan *keempat* Dungga, Tome dan Moha (2017) prinsip akuntabilitas pemerintahan desa di Kecamatan Telaga Jaya suda dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa se Kecamatan Telaga Jaya menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati dan memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astriandy (2018) dan Priskila (2020) menyatakan bahwa belum sepenuhnya prinsip akuntabilitas dilakukan oleh Pemerintah Desa Salumakki, pemerintah merasa bahwa laporan pertanggungjawaban tidak perlu disampaikan kepada masyarakat, Pemerintah masih belum memenuhi kewajiban untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa.

4.3.2 Pengaruh transparansi terhadap tata kelola Pemerintahan Desa

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial variable transparansi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap tata kelola Pemerintahan Desa (Y) di kecamatan Walenrang. Hal ini dapat dilihat pada table 4.7 yang menunjukkan hasil tidak signifikan sebesar 0,622 atau diatas tingkat signifikan 0,05 sehingga dengan begitu hipotesis kedua (H2) ditolak dimana tingkat transparansi tidak berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap tata kelola Pemerintahan Desa.

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa prinsip transparansi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap tata kelola Pemerintahan desa (Y) di Kecamatan Walenrang. Akan tetapi telah menjalankan transparansi tetapi tidak sepenuhnya dijalankan oleh Pemerintah desa di Kecamatan Walenrang. Karena pemerintah tidak menyampaik informas secara terbuka mengenai laporan realisasi kepada masyarakat, namun instansi pemerintah desa akan memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban tersebut, masyarakat hanya dapat mengakses langsung ke kantor desa dengan melihat papan pengumuman desa maupun papan baleho atau spanduk. Hal ini

dikarenakan sistem pemerintahan Desa di Kecamatan Walenrang belum menggunakan sistem online, sehingga masyarakat hanya dapat mengakses langsung ke kantor desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Priskila, 2020) menyatakan bahwa Dari analisis tersebut, Prinsip Transparansi sudah dijalankan oleh Pemerintah Desa Salumakki, namun belum sepenuhnya, karena pemerintah tidak menyampaikan informasi mengenai laporan realisasi kepada masyarakat, namun pemerintah akan memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban tersebut. Untuk mengakses laporan tersebut, masyarakat hanya dapat mengakses langsung ke kantor kepala desa. Hal ini dikarenakan sistem pemerintahan Desa Salumakki belum menggunakan sistem online, sehingga masyarakat hanya dapat mengakses langsung ke kantor desa.

Namun penelitian ini belum sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ardiyanti (2019) Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Penelitian mengenai transparansi atau keterbukaan pemerintah desa ini ditunjukkan oleh pemerintah desa dengan mengajak masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES). Dalam pelaksanaan transparansi ini pemerintah juga menyediakan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan keuangan maupun non keuangan yang ditempel di papan pengumuman desa

maupun di papan baleho atau spanduk. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arsik dan Lawelai (2020) Dari hasil wawancara yang di dapatkan dilapangan menunjukkan bahwasanya Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton Selatan sudah dengan jelas melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Hal ini di simpulkan karena, dalam wawancara dan berinteraksi dengan perangkat Desa Banabungi pada umumnya semua terbuka dalam menyampaikan segala persoalan di dalam ruanglingkup Desa Banabungi.

4.3.3 Pengaruh efektif dan efesien terhadap tata kelola Pemerintahan Desa

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial variable efektif dan efesien (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap tata kelola Pemerintahan Desa (Y) di kecamatan Walenrang. Hal ini dapat dilihat pada table 4.7 yang menunjukkan hasil tidak signifikan sebesar 0,979 atau diatas tingkat signifikan 0,05 sehingga dengan begitu hipotesis kedua (H3) ditolak dimana tingkat efektif dan efesien tidak berpegaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap tata kelola Pemerintahan Desa.

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa prinsip efektif dan efesien tidak berpegaruh secara negatif terhadap tata kelola Pemerintahan desa, akan tetapi telah menjalankan prinsip efektif dan efesien cukup baik, pemerintah desa di kecamatan walenrang telah menerapkan optimalisasi SOP (Standar Operasional Pelayanan) kepada masyarakat sepertikependudukan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heriyanto (2015) menyatakan bahwa adanya kantor pelayanan umum kualitas

pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Desa Triharjo sudah cukup baik, pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Pemerintah Desa Triharjo telah menerapkan optimalisasi SOP (Standar Operasional Pelayanan) kepada masyarakat. Bentuk pelayanan publik berupa jasa layanan administrasi yang bersifat umum seperti kependudukan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai akuntabilitas, transparansi dan efektif dan efisiensi terhadap tata kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Walenrang maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tata kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Walenrang, sehingga hipotesis pertama dinyatakan diterima.
- b. Transparansi secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tata kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Walenrang, sehingga hipotesis kedua dinyatakan ditolak.
- c. Efektif dan Efisien secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tata kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Walenrang, sehingga hipotesis ketiganya dinyatakan ditolak.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian diatas maka penulis memberikan saran antara lain:

- a. Diharapkan agar penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi penelitian selanjutnya yang memiliki topik dan tema yang sama.
- b. Selain menggunakan kuesioner secara tertulis bisa di tambahkan dengan menggunakan wawancara atau interview. Selain itu, untuk penelitian

selanjutnya diharapkan melaksanakan penelitian dengan responden yang lebih luas agar penelitian dapat digunakan secara universal. Serta peneliti selanjutnya diarpakan menambah variabel penelitian, agar dapat diketahui adanya variabel lain yang mempengaruhi tata kelola Pemerintahan Desa.

5.3. Keterbatasan

- a. Model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen hanya sebesar 19,1% sedangkan sisanya sebesar 80,9% dipengaruhi oleh faktor lain.
- b. Data penelitian yang berasal dari persepsi responden yang disampaikan secara tertulis dengan bentuk instrument kuesioner mungkin mempengaruhi validitas hasilnya. Persepsi responden belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
- c. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi dan efektif dan efisien sehingga dimungkinkan adanya variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen atau tata kelola Pemerintahan Desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Anas heriyanto. (2015). Penerapan prinsip-prinsip *good governaonce* dalam tata kelola pemerintahan desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*.
- Ardiyanti, R. (2019). Pekaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada desa woro.kec.Kragan. kab.Kragan Rembang. *Skripsi. Universitas islam negeri Walisongo Semarang*.
- Arsik dan Lawelai. (2020). Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas Dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintahan Desa Banabungi. *JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*.
- Christo. (2018). Analisis penerapan prinsip *good government governance* dalam pengelolaan keuangan desa (studi kasus pada desa parit baru. kec.sungai raya. kab.kabu raya). *Skripsi. Universitas Sanata Dharma.Yogyakarta*.
- Ghozali. (2009). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (IV). UNDIP. <https://teorionline.wordpress.com/ghozali-imam-aplikasi-analisis-multivariate-dengan-program-spss-cetakan-ke-iv-semarang-badan-penerbit-undip/>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2021.
- Ghozali. (2005). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (Ketiga). Unniversitas Diponegoro.
- Handayani dan Nur. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. Publica: *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*.
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas pelayanan publik konaep, Dimensi, indikator dan implementasi*. (Gava Media (ed.)).
- Herdiawanto. (2019). *Kewarganegaran dan Masyarakat Madani* (pertama). Prenada media.
- Herdiwinoto. (2017). Pengertian Good governance. <https://hardiwinoto.com/good-government-governance/>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2021.
- Hutapea, H. D., & Aysa. (2017). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Pemerintahan Desa Adiankoting Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara). *Ilmiah Politeknik Mandiri Bina Prestasi*,6(1), 137–148.

- Ikhsan W R. (2017). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pemerintahan desa (Studi Desa Pesse. Kecamatan Donri-Donri. Kabupaten Soppeng). *Skripsi Universitas Hasanuddun. Makassar.*
- Kompas. (2016). Enam Kepala Desa jadi tersangka.<https://regional.kompas.com/read/Enam.Kepala.Desajadi.Tersangka.Dugaan.Korupsi.Dana.Desajadi>. Diakses pada tanggal 28 Januari 2021
- Prameswari. (2020). *Good governance* Devenisi dan prinsipnya. <https://www.kompas.com/skola/read/good-governance-definisi-dan.prinsipnya>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2021.
- Pratama. (2020). Analisis Prinsip Good governance dalam pengelolaan Desa studi kasus Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. *Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru.*
- Priskila. (2020). Analisis penerapan good government governance dalam pengelolaan keuangan desa (Studi Kasus Pada Desa Salumakki. Kec. Kalumpang. Kab. Mamuju). *Skripsi Universitas Kristen Indonesia Paulus.Makassar.*
- Saparniene dan Valukonyte (2012).Implementation of good governance principles in local self-government: the case of siauliai city. *Socialiniai tyrimai.*
- Salmadian. (2018). Pengertian Demokrasi. <https://salmadian.com/pengertian-demokrasi>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2021
- Sugiyono.2019. *Matode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung:Alfabeta
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa
- Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2015. Alokasi Dana Desa
- Weny, Tome, dan M. (2017). penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan desa di kecamatan telaga jaya kabupaten gorontalo. *Jurnal Ilmiah Hukum.*
- Wikipedia. (2020). Walenrang. Luwu. https://id.wikipedia.org/wiki/Walenrang_Luwu.Diakses pada tanggal 27 Januari 2021.

